

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2008 krisis keuangan global menjadi arena strategis dimana kepala negara dan pemerintahan dari kekuatan ekonomi terbesar dunia duduk bersama untuk membahas isu-isu struktural terkait *G20* (Komarudin & Fadlillah, 2024). *Group of Twenty (G20)* merupakan salah satu forum multilateral yang memainkan peran penting dalam tata Kelola global. *G20* dibentuk pada 1999 sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia yang melumpuhkan ekonomi *emerging markets*, *G20* pada mulanya berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan ekonomi makro antarmenteri keuangan dan bank sentral. *G20* tidak hanya berfungsi sebagai forum ekonomi semata, tetapi juga sebagai panggung politik global yang berpengaruh terhadap arah tata kelola internasional (Cooper et al., 2013; Keohane, 1984).

Bagi Indonesia, keanggotaan dalam *G20* memiliki makna strategis yang beranekaragam. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di forum ini, Indonesia tidak hanya membawa kepentingan nasional, tetapi juga merepresentasikan aspirasi kawasan dan negara-negara *Global South*. Prinsip politik luar negeri bebas-aktif menjadi dasar bagi Indonesia untuk bersikap inklusif dan menjaga netralitas dalam menghadapi perbedaan kepentingan global, di mana Indonesia dapat menjaga sikap netral sekaligus berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global (Acharya, 2014; Prasetyo, 2023). Hal ini mencapai momentum penting ketika Indonesia dipercaya

memegang presidensi *G20* pada tahun 2022, sebuah tanggung jawab yang menempatkan negara ini di pusat diplomasi dunia untuk pertama kalinya.

Presidensi Indonesia pada tahun 2022 diusung dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*, yang menitikberatkan pada tiga agenda utama: penguatan arsitektur kesehatan global, percepatan transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan dengan fokus pada energi terbarukan seperti geothermal yang melimpah di Indonesia (G20 Indonesia, 2022; OECD, 2022.). Agenda ini tidak hanya merefleksikan respons atas tantangan pascapandemi tetapi juga mencerminkan strategi nasional dalam memperkuat kepentingan domestik.

Namun, kepemimpinan Indonesia berlangsung di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu dan penuh gejolak, dimana Indonesia dihadapkan pada dilema diplomatik untuk menjaga netralitas dan kredibilitas presidensinya di tengah tekanan agar memihak salah satu blok kekuatan (Maksum, 2025), di sisi lain Indonesia harus menghadapi berbagai tekanan geopolitik dari mitra Barat. Karena hal tersebutlah kemudian terjadi perbedaan yang mencolok, seperti yang terlihat pada negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mendesak untuk tidak melibatkan Rusia dalam pertemuan, berlawanan dengan sikap negara-negara berkembang seperti India dan Brasil yang menolak adanya politisasi dalam forum ekonomi yang seharusnya fokus pada isu non-militer.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pendekatan diplomasi Indonesia menjadi elemen yang sangat penting dan menentukan keberhasilan presidensi. Sundari (2023) menekankan bahwa fondasi diplomasi Indonesia berfokus pada inklusivitas, kesetaraan, dan komitmen terhadap pendekatan multilateral, yang

diwujudkan melalui *shuttle diplomacy* dan dialog informal. Dokumen *G20* tersebut merupakan kesepakatan yang dicapai oleh semua anggota, meskipun terdapat perbedaan signifikan terkait isu Rusia-Ukraina. Hal ini menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dalam menjaga keberlangsungan forum di tengah krisis geopolitik yang berlanjut, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai "*bridge-builder*" di panggung global (Cooper et al., 2013).

Selain memperhatikan aspek eksternal, kepresidenan Indonesia juga digunakan secara strategis untuk memperluas kepentingan domestik. Komarudin & Fadlillah (2024) menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam *G20* dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional melalui penyelenggaraan *KTT* di Bali yang sukses, dan membuka peluang investasi strategis senilai miliaran dolar di sektor infrastruktur dan energi hijau. Dengan demikian, forum ini tidak hanya berfungsi sebagai panggung global, tetapi juga sebagai alat kebijakan luar negeri yang cerdas atau *smart power* untuk memajukan kepentingan nasional, termasuk penguatan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di Indo-Pasifik (Nye, 2004).

Isi Deklarasi *G20* Bali mencerminkan pencapaian agenda yang dilaksanakan oleh Indonesia selama kepresidenan tahun 2022, dengan 52 paragraf yang mencakup isu-isu krusial. Dokumen ini bukan hanya sebuah pernyataan diplomatik formal, melainkan juga merupakan lambang kemampuan Indonesia dalam menangani dinamika politik global yang kompleks, di mana kompromi dicapai melalui negosiasi intensif (*G20* Indonesia, 2022). Sebagai negara yang

sedang berkembang dan berada di posisi strategis antara negara maju dan berkembang, Indonesia berhasil menjadi penghubung antara perbedaan kepentingan sembari mengangkat isu-isu utama yang penting, seperti ketahanan rantai pasok global. Darmastuti, (2023) menggarisbawahi bahwa salah satu pencapaian utama dari deklarasi ini adalah komitmen terhadap transisi energi yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung pencapaian *SDGs 7* (UNDP, 2023).

Dalam menganalisis dinamika kebijakan luar negeri, teori menjadi fondasi penting untuk memahami rasionalitas keputusan negara (Keohane, 1984). Salah satu teori yang relevan adalah *Rational Choice Theory*. Dari perspektif *Rational Choice Theory*, langkah-langkah Indonesia dapat dipahami sebagai pertimbangan rasional dalam merumuskan strategi kebijakan luar negeri (Gilboa, 2010.; Raub & Weesie, 1990). Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini bisa melihat kebijakan luar negeri Indonesia di forum *G20* sebagai hasil dari kalkulasi rasional untuk mencapai kepentingan nasional tertentu (*national interest*). Morgenthau (1978) menyebut kepentingan nasional sebagai inti dari politik luar negeri. Oleh karena itu, pendekatan rasional dapat menjelaskan bagaimana Indonesia menimbang antara tekanan geopolitik dan peluang ekonomi dalam menentukan sikap diplomatik selama presidensi *G20 2022*.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, kepentingan nasional (*national interest*) menjadi konsep sentral yang mendorong keputusan dan strategi diplomatik Indonesia di *G20*. Menurut Morgenthau (1978), kepentingan nasional merupakan “*the essence of politics*” yang menjadi dasar setiap tindakan negara dalam upaya mempertahankan keamanan, kemakmuran, dan posisi strategisnya di dunia

internasional. Dalam konteks Indonesia, kepentingan nasional mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperluas pengaruh diplomatik, serta meningkatkan reputasi sebagai negara berkembang yang aktif membangun tatanan dunia yang inklusif dan berkeadilan (Komarudin & Fadlillah, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai studi terbaru turut menegaskan pentingnya analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks G20. Miranti et al., (2025) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi dan memperkuat citra diplomatik di tengah fragmentasi geopolitik. Dalam konteks representasi politik, Maksun (2025) menunjukkan bahwa framing media domestik terhadap keberhasilan Presidensi G20 turut memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia dan memperkuat persepsi publik terhadap efektivitas diplomasi nasional.

Sayangnya, penelitian tentang kepresidenan Indonesia di G20 masih tergolong minim dan belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Beberapa penelitian memang telah dilakukan seperti, Sundari (2023) menyoroti strategi diplomasi tanpa menelaah rasionalitas kebijakan luar negeri, Komarudin & Fadlillah (2024) fokus pada kepentingan nasional namun belum mengaitkannya dengan keputusan strategis Indonesia, Prasetyo (2023) membahas diplomasi ekonomi tanpa meninjau konteks politik global, Maksun (2025) menekankan framing media tanpa menyinggung aspek pengambilan keputusan diplomatik, dan Miranti et al. (2025) hanya menelaah arah kebijakan luar negeri tanpa mengintegrasikan hasil deklarasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara kepentingan nasional, strategi diplomasi, dan isi *G20 Bali Leaders' Declaration* melalui pendekatan *Rational Choice Theory* guna memahami rasionalitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pendekatan teoretis yang lebih terstruktur dan inovatif. *Rational choice theory* menjadi perspektif yang tepat untuk digunakan dalam konteks ini, karena mampu menjelaskan keputusan aktor negara sebagai proses kalkulasi rasional. Keohane mengadopsi *Rational Choice Theory* dalam kerangka *Neoliberal Institutionalism*, ia berpendapat bahwa negara bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya, tetapi juga menyadari pentingnya kerja sama melalui institusi internasional untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keuntungan kolektif.

Teori ini mengasumsikan bahwa aktor, termasuk negara, membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional mengenai keuntungan (seperti peningkatan pengaruh diplomatik) dan risiko (seperti kegagalan konsensus) yang ada, dengan mempertimbangkan batasan seperti informasi tidak sempurna di mana negara tidak selalu memiliki data lengkap tentang niat mitra, keterbatasan sumber daya, seperti anggaran diplomasi Indonesia yang relatif terbatas dibandingkan kekuatan besar, dan interaksi strategis antaraktor, seperti negosiasi di mana satu pihak mengantisipasi respons pihak lain.

Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Indonesia mengambil keputusan kebijakan luar

negeri secara rasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya di forum multilateral *G20*, serta bagaimana diplomasi yang dijalankan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tekanan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menentukan judul penelitian “**Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam *G20 Bali Leaders Declaration***”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis *G20 Bali Leaders' Declaration* dalam bentuk pemetaan kepentingan Indonesia untuk memahami arah dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *G20 Bali Leaders Declaration* untuk memahami posisi dan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral
2. Memetakan kepentingan Indonesia dalam *G20 Bali Leaders* untuk melihat arah dan prioritas kebijakan luar negeri

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hubungan Internasional, khususnya dalam kajian analisis kebijakan luar negeri dan pemetaan kepentingan nasional dalam forum multilateral seperti *G20*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait strategi diplomasi dan prioritas kebijaka luar negeri Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembuat kebijakan di Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum Internasional. Penelitian ini juga dapat membantu dalam perumusan kebijakan luar negeri yang lebih tepat sasaran serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan strategi diplomasi Indonesia.

